

Diplomasi Jepang Terhadap Rusia dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril Selatan Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2016)

Yayah Fitriyah¹

Anggun Puspitasari²

Abstract

This study aims to describe the Japanese diplomacy towards Russian to solve the Southern Kuril Islands disputes during the reign of Shinzo Abe (2012-2016). The problems that have occurred has impacted the bilateral relations between Japan and Russia. So billateral diplomacy is a strategy that Shinzo Abe takes toward Russia to resolving the dispute over the southern Kuril Islands. This research uses qualitative methods. and using conflict resolution theory and the theory of diplomacy in the framework. The results showed that the diplomacy carried by the Japanese prime minister Shinzo Abe is proposing eight points of bilateral cooperation with Russia. The cooperation covers economy cooperation. politics. security. environment. infrastructure. investment. trade. energy. pharmaceutical. and technology. Based by theory that such cooperation can reduce the tension between Japan and Russia caused by a dispute over the southern Kuril Islands.

Keywords: *diplomacy, dispute, Japan, Russia, South Kuril Islands*

Pendahuluan

Pasca Perang Dunia II permasalahan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia internasional. permasalahan wilayah/territorial suatu negara juga sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan antar negara yang berdaulat. itu berbagai permasalahan wilayah/territorial ini telah terjadi di berbagai belahan dunia. termasuk di wilayah Asia Timur.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia. dan telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa di paruh kedua abad ke-20 setelah kehancuran di Perang Dunia Kedua. Namun. hubungan Jepang dengan negara tetangganya masih sangat dipengaruhi oleh warisan tindakan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu menyebabkan Jepang mengalami beberapa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Email: yayahfitriyah2@gmail.com

² Dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur

sengketa dengan negara-negara tetangganya. diantaranya: Sengketa di Laut Cina Timur dengan Tiongkok atas pulau Senkaku. dengan Korea Selatan atas pulau Takeshima. dan dengan Rusia atas Kepulauan Kuril Selatan (Gaens, 2013: 1). Perselisihan antara Rusia dan Jepang atas Kepulauan Kuril selatan ini merupakan salah satu sengketa teritorial terpanjang yang terjadi di Asia Timur (Gorenburg, 2012: 1).

Kepulauan Kuril merupakan rangkaian pulau yang membentang melintasi samudera pasifik dari pulau Hokkaido (Jepang) ke ujung selatan semenanjung Kamchatka (Rusia). Empat pulau yang menurut Rusia di sebut sebagai Kuril Selatan dan Jepang menyebutnya wilayah Utara merupakan subjek sengketa antara keduanya. Pulau-pulau tersebut yakni pulau Kunashir (dikenal Jepang sebagai Kunashiri). Iturup (Etorofu). Shikotan dan pulau Habomai. Sumber daya alam juga menjadi bagian dari alasan Jepang dan Rusia bersengketa atas Kepulauan Kuril Selatan ini. Pulau-pulau ini dikelilingi oleh lahan perikanan yang kaya dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas lepas pantai. Sebelumnya telah ada beberapa perjanjian-perjanjian antara Jepang dan Rusia mengenai status kepemilikan pulau-pulau tersebut. Diantaranya adalah: perjanjian Shimoda (1855). perjanjian saint pettersburg (1875). perjanjian portsmouth (1905). perjanjian Yalta dan deklarasi postdam (1945). perjanjian san Francisco (1951). Namun sampai semua itu belum dapat direalisasikan dengan baik karena kedua negara masih berpegang teguh pada klaimnya masing-masing yang membuat persengketaan ini sulit untuk terselesaikan (D.V., 2013: 1).

Tahun 2012 saat terpilihnya kembali Shinzo Abe menjadi Perdana menteri Jepang masih belum ada penyelesaian dan penandatanganan perjanjian damai antara Jepang dan Rusia. Shinzo Abe merupakan salah satu politisi konservatif Jepang yang pada kampanyenya ia menyerukan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal untuk bertindak cukup agresif untuk mempertahankan wilayah Jepang dalam sengketa dengan negara-negara tetangga (Dawson, 2013). Shinzo Abe bertekad untuk melakukan berbagai cara diplomatik untuk memperbaiki kembali hubungan Jepang dan Rusia. Abe juga menerapkan strategi diplomasi ini untuk menyelesaikan persengketaan Kepulauan Kuril Selatan yang sampai saat ini membuat hubungan diplomatik kedua negara memburuk (Fillippoy, 2016). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana "diplomasi Jepang terhadap Rusia dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril Selatan pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2016)?"

Pembahasan

Kerangka konseptual yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini adalah teori resolusi konflik. Menurut *Lewis Coser* seorang sosiolog Amerika mendefinisikan konflik sebagai "bentrokan nilai-nilai dan kepentingan. serta ketegangan antara beberapa pihak". Konflik sendiri terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antara masing-masing pihak. Konsep ini tidak hanya membahas mengenai penyelesaian masalah terhadap konflik. tetapi juga membahas mengenai bagaimana menangani persengketaan. krisis. maupun perselisihan. Selain itu. teori ini juga membahas mengenai bagaimana cara mendeekalaskan ketegangan antara negara satu dengan negara lainnya. Jenis-jenis intensitas ketegangan antar negara dibagi menjadi beberapa tahap. yaitu: sengketa (*dispute*). krisis non-kekerasan (*non-violent crisis*). krisis kekerasan (*violent crisis*). perang

terbatas (*limited war*). dan perang (*war*). Tiga tingkat terakhir (krisis kekerasan. perang terbatas. dan perang) merupakan kategori konflik kekerasan. Sedangkan dua tingkat pertama (sengketa dan krisis non-kekerasan) adalah kategori konflik non-kekerasan.

Sengketa adalah konflik politik antara dua belah pihak yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. sengketa juga merupakan situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan dalam situasi tersebut menunjukkan perbedaan pendapat. Sedangkan dalam krisis non-kekerasan salah satu aktor mengancam untuk menggunakan kekerasan. namun kekerasan disini dimaksudkan hanya sebuah ancaman tanpa resiko bahaya bagi seseorang dan tanpa penggunaan senjata (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2016: 7). Dalam penelitian ini tatanannya adalah persengketaan. dimana terjadi perbedaan pendapat dan dasar klaim antara Jepang dan Rusia atas posisi Kepulauan Kuril Selatan danada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Rusia mendasarkan klaimnya berdasarkan: (1) perjanjian Yalta (Februari 1945). (2) Deklarasi Potsdam (Juli 1945). dan (3) Perjanjian San Francisco (September 1951). Sedangkan Jepang mendasarkan kalamnya berdasarkan: (1) perjanjian Shimoda 1855; (2) Perjanjian St. Petersburg 1875; (3) Perjanjian Portsmouth 1905; (4) Deklarasi Bersama Jepang - Rusia 1956.

John W. Burton mengatakan bahwa resolusi konflik berarti mengakhiri konflik dengan metode yang analitis dimana penyelesaiannya dengan melihat ke akar masalah yang menyebabkan adanya perilaku konflik (*problem solving*) (Burton, 1993: 1-3). Resolusi konflik menurut burton adalah dengan bersama sama melakukan negosiasi dan mediasi antar dua belah pihak yang berkonflik. Negosiasi yang baik diwujudkan dalam praktek diplomasi antar negara (Burton, 1993: 1-3). Menurut *Ronald Peter Barston* dalam bukunya *Modern Diplomacy* bahwa diplomasi merupakan seni dan praktek negosiasi antara perwakilan dari negara atau kelompok negara. Diplomasi ini dilakukan dengan mengutamakan perdamaian untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan bersama (Barston, 2014). Negosiasi dan diplomasi dalam kaitannya dengan resolusi konflik. yaitu dimana masing-masing pihak (biasanya antara dua pihak yang beseteru) mencoba saling mempengaruhi lawan untuk mengikuti kepentingan masing-masing.

Nilai Strategis Kepulauan Kuril Selatan

Persengketaan Kepulauan Kuril (wilayah Utara Jepang) merupakan persengketaan antara Jepang dan Rusia atas Kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Uni Soviet Menduduki Pulau-pulau yang di sengkatakan dalam Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia II. Pulau-pulau yang disengkatakan ini sekarang berada dibawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan. Oblast Sakhalin. Namun diklaim Jepang sebagai territorial Utara Jepang.

Alasan utama para pemimpin Rusia bersikeras menjaga kepemilikan Kepulauan Kuril ini karena berhubungannya erat dengan konsepsi kehormatan nasional dalam arti bahwa penyerahan atas kepulauan ini akan dilihat oleh masyarakat internasional dan penduduk Rusia sendiri sebagai pengakuan kelemahan. Namun. ada juga beberapa pertimbangan yang lebih praktis yang telah mendorong Pemerintah Rusia tidak ingin berkompromi atas sengketa ini. Menurut para ahli Rusia. pulau-pulau dan perairan di Kepulauan Kuril ini memiliki banyak nilai ekonomi mineral dan sumber daya. yang meliputi deposito hidrokarbon lepas pantai. emas. perak. besi. dan titanium. Pulau-pulau ini juga

dikelilingi oleh lahan perikanan yang kaya dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas lepas pantai. Deposito renium langka juga telah ditemukan di gunung berapi Kudriavy di Iturup. Empat pulau Kuril ini berisi sekitar 160 juta ton gas alam dan hampir 1.900 ton emas dan mineral berharga lainnya. seperti perak. titanium dan renium. dengan total nilai \$ 50 miliar (Chan, 2011). Pariwisata juga merupakan sumber potensial pendapatan. seperti pulau-pulau memiliki beberapa gunung berapi dan berbagai habitat burung (Chan, 2011). Jepang juga tertarik dengan sumber daya alam dari Kepulauan Kuril Selatan ini. seperti: 1.867 ton emas. 9.284 ton perak. deposito terbesar di dunia renium digunakan dalam pembuatan mesin jet. deposito gas alam. minyak. laut yang kaya plankton. dan es bebas di selat Vries dan Catherine. Untuk negara yang selalu memiliki sumber daya alam yang langka. kepemilikan pulau-pulau ini bisa memainkan peran positif (Sukovitsyn, 2012).

Hubungan Bilateral Jepang dan Rusia

Jepang dan Rusia merupakan negara yang berada dalam posisi dimana keduanya harus berkontribusi baik secara individu ataupun bersama-sama dalam pembentukan dunia pasca Perang Dingin. Dikarenakan kedua negara mempunyai identitas nasional sebagai Kekuatan Besar yang secara otomatis mengharuskan mereka untuk memainkan peran yang lebih dalam dunia global maupun regional. Selanjutnya. secara geografis keduanya merupakan tetangga dan mitra yang penting. karena masing-masing negara mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi atau menghalangi dalam kepentingan nasional masing-masing (Akaha, 1999: 1).

Hubungan Jepang dan Rusia terhambat karena belum adanya perjanjian perdamaian yang menyatakan berakhirnya peperangan antara kedua negara setelah Perang Dunia II. Memburuknya hubungan Jepang–Rusia pada awal mulanya dasari oleh perang yang terjadi pada masa kekaisaran. Hal ini diperparah dengan pecahnya Perang Dunia I dan II. kemudian dilanjutkan dengan Perang Dingin. Perang tersebut tidak hanya menghasilkan sejarah bagi kedua negara. namun juga meninggalkan berbagai sengketa perebutan wilayah antar negara (Akaha, 1999: 1). Tantangan lainnya adalah dikarenakan tingkat perdagangan Rusia-Jepang dan investasi Jepang di Rusia yang mengecewakan (RIA-Novosti Daily Review, 1997). Rusia lebih banyak menjual ke Jepang daripada membeli karena banyak barang-barang Jepang yang terlalu mahal untuk pasar Rusia. dan teknologi Jepang sering kali terlalu canggih (Sumber: Russian Far East Economy: Growing Expectation for Japanese Investment).

Letak kedekatan geografis Jepang dan Rusia juga memberi peluang untuk kerjasama bagi keduanya (Kenichi, 2005: 1-2). Kedekatan geografis ini juga membuat kedua negara mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat memberi peluang bagi Jepang dan Rusia untuk kerjasama di berbagai bidang. baik itu politik. ekonomi. pertahanan ataupun kemanan. Keterkaitan hubungan antara Jepang-Rusia dapat dilihat berdasarkan kebutuhan Jepang terhadap energi yang cukup tinggi. Sebagai salah satu negara industri dengan teknologi tinggi Jepang tidak mampu memenuhi konsumsi sumber daya energi domestiknya (Energy Research Institute Of The Russian Academy Of Sciences And Institute Of Energy Economics Japan, 2014). Hal tersebut karena Jepang tidak memiliki sumber daya energi dalam negeri. Oleh sebab itu. Jepang menjadi salah satu negara yang berkebutuhan energi tinggi. Sebaliknya. Rusia merupakan negara penghasil energi dengan jumlah yang besar di dunia. Keadaan tersebut tentu akan saling menguntungkan bagi

kedua negara. apabila keduanya menjalin hubungan baik. Melihat sangat dekatnya hubungan kedua negara tentu potensi untuk kerjasama antara kedua negara ini juga sangat besar. namun hal tersebut tentunya harus di dukung oleh pemerintah masing-masing (Russia-US Energy information Administration, 2016).

Diplomasi Jepang Terhadap Rusia Dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril Selatan Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2016)

Hubungan Jepang dengan negara tetangganya masih sangat dipengaruhi oleh warisan tindakan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Jepang menjadi sulit menemukan cara untuk dapat diterima dan menebus perlakuannya terhadap warga negara yang pernah didudukinya (Russia-US Energy information Administration, 2016). Setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jepang dihadapkan pada Perang Dingin yang di pengaruhi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagian besar konflik yang terjadi pada masa Perang Dingin mencerminkan ideologi. hal tersebut berdasarkan konfrontasi antara blok Barat dan blok Timur yang memiliki karakter perang yang kuat dan memiliki ideologi yang berbeda. Namun setelah Perang Dingin berakhir signifikansi konflik tersebut mulai menghilang. dalam konteks ini. kebijakan luar negeri Jepang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan diplomatis. Jepang juga telah memperluas peran diplomatiknya di lingkungan Internasional (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2015).

Penandatanganan perjanjian antara Jepang-Amerika Serikat di San Fransisco tanggal 8 September 1951 membuat Jepang menjadi negara yang bergantung dengan Amerika Serikat dalam hal pertahanannya. Setelah itu Jepang berkonsentrasi pada pembangunan ekonominya. dalam hal ini Jepang menggunakan strategi diplomasi. terutama terhadap lingkungan Asia. Jepang bersikap *low-key*. diplomasi secara damai. dan *nonassertive*. Kebijakan luar negeri Untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional Jepang. Jepang melaksanakan kebijakan luar negerinya berdasarkan tiga pilar. yaitu: (1) memperkuat aliansi Jepang-AS; (2) meningkatkan hubungan dengan negara tetangga; (3) penguatan diplomasi ekonomi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang (Drifte, 1990: 2).

Di antara aturan formal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang yang paling menonjol adalah Pasal 9 dari konstitusi Jepang. yang menyatakan (Chai, 1997: 396):

"Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order. the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes."

Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956. Jepang telah memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat internasional. Jepang juga menjadi anggota G8. Hubungan dengan negara-negara Asia lain merupakan prioritas khusus bagi Jepang. oleh karena itu Jepang juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai perdamaian. kemakmuran. dan stabilitas keamanan dunia. Jepang memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu-isu global. misalnya memerangi terorisme. membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia. dan melindungi lingkungan internasional. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adikuasa dunia (Sumber: Kedutaan Besar Jepang di Indonesia).

Dalam rangka menciptakan lingkungan internasional yang stabil, bagi Jepang sangat penting membangun kepercayaan dan hubungan kerjasama dengan negara-negara diseluruh dunia dan masyarakat internasional dengan cara diplomatik. Hal tersebut berguna untuk memperkuat dasar stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional dan untuk mencegah munculnya ancaman keamanan. Dari perspektif tersebut, Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, Abe mengerahkan diplomasi untuk memberikan kontribusi dalam memastikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional dibawah kebijakan "*Proactive Contribution to Peace*" berdasarkan pada prinsip kerjasama internasional. Selain itu, dalam "*Proactive Contribution to Peace*" Jepang juga berupaya untuk mengatasi isu-isu global seperti sengketa teritorial (Sumber: Diplomatic Bluebook Japan 2016).

Selama masa pemerintahannya Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengunjungi 63 negara dan wilayah (86 negara dan daerah secara total) sejauh ini, dan dilakukan hampir 400 pertemuan KTT. Kemudian, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida mengunjungi 42 negara dan wilayah (65 negara dan wilayah total), dan dilakukan 604 pertemuan dengan pejabat asing termasuk 247 pertemuan dengan menteri dari 104 negara (sampai bulan Februari 20, 2016). Akibatnya, kehadiran Jepang dalam masyarakat internasional semakin meningkat dan semakin meningkatnya kepercayaan pribadi antara Perdana Menteri Abe dan para pemimpin asing serta antara Menteri Luar Negeri Kishida dan menteri asing lainnya (Sumber: Diplomatic Bluebook Japan 2016).

Budaya diplomasi Jepang ini, menurut teori resolusi konflik adalah alat terbaik yang dapat digunakan untuk meminimalkan dan mengurangi situasi konfliktual menjadi perdamaian dan proses pembangunan. Maka, dalam diplomasi yang dilakukan Jepang ini, Jepang berupaya agar kedua pihak yang bertikai masuk kedalam perjanjian dan kerjasama untuk memecahkan permasalahan diantara mereka dan harus menerima satu sama lainnya demi kelangsungan hubungan kedua belah pihak. Diplomasi yang dilakukan Jepang juga bukan hanya untuk mengakhiri konflik dan sengketa dengan negara-negara lain, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan negara-negara di seluruh dunia.

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada akhir 2012, Shinzo Abe telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan tegang antara Jepang dengan Rusia terkait Sengketa Kepulauan Kuril Selatan (*Northern Territories*). Jepang akan melipatgandakan upaya negosiasi dan lebih proaktif dalam dialog politik dengan Rusia melalui berbagai kesempatan. Oleh karena itu Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Vladimir Putin bertemu pada berbagai kesempatan di sela-sela pertemuan internasional.

Ada sejumlah faktor mendorong Jepang untuk menormalkan hubungan dengan Rusia, termasuk keinginan untuk memperkuat hubungan keamanan energi dan perlindungan terhadap kekuasaan Tiongkok di wilayah itu. Tapi motivasi politik utama Abe yaitu tetap pada keinginannya untuk mencapai terobosan diplomatik dengan Putin pada sengketa wilayah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun atas pulau-pulau di Kepulauan Kuril Selatan (disebut Wilayah Utara oleh Jepang). Rusia telah mendapatkan empat pulau (Etorofu, Kunashiri, Habomai, dan Shikotan) sejak Uni Soviet merebut wilayah tersebut pada akhir Perang Dunia II. Setiap Perdana Menteri Jepang telah berupaya dengan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa teritorial ini, dan sekarang

Abe sedang mencoba lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara diplomatik.

Ada banyak negosiasi dan usulan sejak tahun 1956. tapi tidak ada indikasi nyata bahwa Rusia bersedia untuk mengubah posisinya di Kepulauan Kuril Selatan. Meskipun Putin berkeinginan untuk segera mengakhiri sengketa wilayah dengan Jepang. para pejabat dan politisi Rusia lainnya mengatakan bahwa pulau-pulau tersebut tidak akan dikembalikan. Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Vladimir Putin telah mengadakan 15 pertemuan puncak. di mana mereka telah memperdalam persahabatan dan kepercayaan mereka (Sumber: The Government of Japan) di antaranya dijelaskan pada bagian-bagian berikut.

KTT Jepang-Rusia di Moscow, Rusia

Pada tanggal 28-30 April 2013. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan resmi ke Rusia. Abe menjadi yang pertama Perdana Menteri Jepang secara resmi mengunjungi Rusia dalam 10 tahun terakhir. Dalam kunjungannya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan memberlakukan perjanjian perdamaian pada masa Perang Dunia II. Selama kunjungan. Perdana Menteri Abe menegaskan minatnya untuk mengatur ulang hubungan dengan Rusia dan mengakhiri sengketa melalui jalur diplomasi (Talukdar, 2014: 1-2).

Setelah pembicaraan. kedua negara menandatangani beberapa dokumen perjanjian yang berurusan dengan berbagai bidang kerjasama. termasuk politik. perdagangan. investasi. budaya. kemanusiaan dan bidang-bidang lain dari kerjasama. Dokumen tersebut juga menyebutkan kerjasama bilateral dalam konteks mengenai isu-isu internasional. Kedua negara menggunakan dokumen ini sebagai "*road map*" bagi hubungan Rusia-Jepang. Setelah kunjungan Abe. Rusia dan Jepang sepakat untuk meluncurkan mekanisme bilateral antara menteri pertahanan dan menteri luar negeri dalam format 2 + 2 (Druzhinin, 2016).

KTT G20 di Saint Petersburg, Rusia

Pada tanggal 5-9 September 2013 diadakan KTT G20 di Istana Konstantin di Saint Petersburg. Russia. Pada tanggal 5 September. pada kunjungannya ke Saint Petersburg untuk menghadiri G20. Perdana Menteri Shinzo Abe mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. dimulai pada 01:25 (waktu Rusia) selama kurang lebih 40 menit. Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal. diantaranya:

1. Kerjasama di bidang keamanan
Perdana Menteri Abe menyatakan bahwa strategi 2 + 2 akan menjadi tonggak penting untuk meningkatkan hubungan saling percaya dan membangun kerjasama yang kuat antara Jepang dan Rusia di bidang keamanan. Presiden Putin juga menyambut diadakannya 2 + 2. Perdana Menteri Abe juga mengusulkan untuk membahas lingkungan keamanan regional. kebijakan keamanan masing-masing negara dan juga untuk mendiskusikan langkah-langkah koperasi baru di bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Putin menyetujui usulan mengenai hal ini.

2. Kerjasama di bidang ekonomi
Perdagangan dan ekonomi hubungan antara Jepang dan Rusia saat ini terus berkembang. jumlah perdagangan bilateral tahun ini meningkat terlepas dari perlambatan ekonomi global dan kerjasama antara kedua negara telah mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hubungan ekonomi antara kedua negara ini terus mengalami kemajuan sejak kunjungan Jepang ke Rusia pada bulan April. di daerah seperti energi. lingkungan perkotaan. pembangunan di Timur Jauh Rusia. pertanian dan perawatan medis. Secara khusus. ia menyebutkan langkah-langkah kooperatif spesifik di bidang lingkungan perkotaan dan perawatan medis. dan dipasarkan peralatan Jepang untuk Rusia seperti pengenalan rumah sakit peralatan medis canggih.
3. Perjanjian Perdamaian
Pada pertemuan ini berfokus pada isu perjanjian damai dan setuju untuk mencapai solusi yang dapat saling diterima dari sengketa territorial. Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan hendak mencari "penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak" (Druzhinin, 2016). Kedua pemimpin menegaskan bahwa Jepang dan Rusia akan terus bergerak maju dengan konsultasi di tingkat wakil menteri yang telah dilaksanakan. kedua belah pihak juga akan melanjutkan dengan pembicaraan dalam suasana yang ramah dan tenang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2013).
Dalam pertemuan ini. sebagai respon Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan kata-kata yang bernada damai. Dia mengatakan bahwa tidak normal jika antara dua negara yang bertetangga tidak ada perjanjian perdamaian. Saat itu juga Putin mengatakan dia ingin menyelesaikan pertikaian dengan cara "*hikiwake*". yaitu ungkapan dalam olahraga yudo yang berarti "seri".

KTT Jepang-Rusia di Sochi, Rusia

Pada tanggal 6 Mei 2015 diadakan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di kota Sochi. Rusia. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kerjasama ekonomi serta dialog politik. Shinzo Abe mengusulkan delapan poin kerjasama ekonomi di berbagai bidang. diantaranya:

1. Kerjasama dalam meningkatkan perawatan medis di Rusia dan meningkatkan harapan hidup sehat. seperti dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Kesehatan Rusia-Jepang dengan teknologi mutakhir dan rumah sakit bergaya Jepang.
2. Kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang bersih. nyaman. dan perkotaan layak huni berdasarkan pengetahuan Jepang dan teknologi yang diarahkan melalui isu-isu perkotaan selama bertahun-tahun. Secara khusus. kerjasama tersebut termasuk pembuatan rumah untuk iklim dingin; sistem pengelolaan sampah; solusi kemacetan lalu lintas; air dan sistem pembuangan limbah; layanan pos memanfaatkan jaringan transportasi perkotaan; dan pengembangan brownfield.

3. Kerjasama untuk secara dramatis meningkatkan hubungan bisnis antara perusahaan Jepang dan Rusia. termasuk melalui bisnis yang cocok. dukungan untuk usaha baru. dan pertukaran industri. semua ini dilakukan oleh organisasi promosi yang baru didirikan.
4. Pembangunan bersama minyak. gas. dan sumber daya energi lainnya; termasuk upaya untuk memperluas kapasitas produksi dan diversifikasi pembuatan produk berbasis minyak. Ini akan melibatkan kolaborasi lebih dekat di seluruh rantai pengiriman dan akan menjadi proyek besar yang melambungkan seluruh skema kerjasama.
5. Kerjasama untuk mempromosikan diversifikasi industri Rusia dan meningkatkan produktivitas.
6. Skala penuh promosi industri di Rusia Timur Jauh dan kerja koperasi untuk membuat wilayah dasar untuk ekspor ke pasar Asia-Pasifik. Dalam hal ini termasuk peningkatan fasilitas pelabuhan dan bandara untuk pengolahan hasil kelautan dan konstruksi pabrik kayu.
7. Kerjasama di bidang tenaga nuklir. teknologi informasi. dan teknologi canggih menyatukan Jepang dan Rusia.
8. Upaya untuk memperdalam saling pengertian antara orang-orang Jepang dan Rusia melalui pariwisata diperluas dan pertukaran antara mahasiswa dan kaum muda lainnya. serta fokus pada pertumbuhan dalam pertukaran pribadi dalam bidang-bidang seperti olahraga dan budaya (Masaru, 2016).

Pada pertemuan ini kedua pemimpin juga sepakat untuk secara aktif terlibat dalam dialog politik tingkat tinggi dan kunjungan dengan memanfaatkan peluang di berbagai konferensi internasional. Perdana Menteri Abe menerima undangan Presiden Putin ke Forum Ekonomi Timur (*Eastern Economic Forum*) yang diadakan di Vladivostok pada bulan September 2015. disana kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak lain pada waktu itu. Selain itu. kedua pemimpin juga menegaskan niat mereka untuk melanjutkan dengan persiapan kunjungan Presiden Putin ke Jepang dan setuju untuk mencari waktu yang paling tepat untuk kunjungan tersebut (Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Setelah pertemuan tersebut Pemerintah Rusia mengeluarkan kebijakan bahwa Rusia akan meningkatkan investasi di wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Jepang melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk membahas sengketa wilayah dengan Rusia. Kedua negara telah mencoba untuk memperbaiki hubungan dan mendorong pengembangan wilayah yang disengketakan dan menghasilkan sedikit kemajuan (Sankar, 2016).

Eastern Economic Forum 2015 di Vladivostok Rusia

Pada tanggal 3-5 september 2015 diadakan pertemuan *Eastern Economic Forum* (Forum Ekonomi Timur) di Vladivostok Rusia. Pada tanggal 2 September. 2016. Putin dan Abe bertemu di Vladivostok di sela-sela Forum Ekonomi Timur. Kedua pemimpin membahas pengembangan kerjasama bilateral dan interaksi di Asia Pasifik. Dalam pidatonya. Perdana

Menteri Shinzo Abe membuat permohonan yang tegas kepada presiden Vladimir Putin untuk segera menyelesaikan masalah teritorial atas Kepulauan Kuril Selatan. Kemudian dalam menjawab pidato Abe.

Putin menegaskan bahwa Rusia sangat terbuka untuk berdialog dengan Jepang untuk mencapai kompromi. Sejauh ini, sangat sedikit kemajuan dari Pertemuan Tingkat Tinggi antara Rusia-Jepang, oleh karena itu pengamat menyarankan bahwa dengan diplomasi antara Putin-Abe mungkin menghasilkan terobosan yang lebih baik (Miller, 2016).

Shinzo Abe juga berjanji untuk mengembangkan ekonomi dengan "delapan poin rencana" yang sudah di usulkan pada pertemuan sebelumnya dengan Rusia di Sochi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi Jepang dengan Rusia. Selain itu, ia telah memberikan kepercayaannya kepada Hiroshige Seko, untuk menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, dengan portofolio baru yang difokuskan pada kerjasama ekonomi dengan Moskow. Rencana tersebut mencakup beberapa bidang, termasuk keamanan energi, investasi Jepang di bagian Timur Rusia, dan peningkatan pertukaran antara perusahaan kecil menengah di kedua negara. Ia mempertaruhkan sejumlah besar modal politik pada pencapaian kesepakatan besar dengan Putin.

Beberapa hari setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memimpin delegasi besar ke *Eastern Economic Forum* (EEF) di Vladivostok, Alexander Galushka, Menteri Pengembangan di Rusia Timur membalas kunjungan dengan mengunjungi Tokyo. Kunjungan Galushka ini dipandang sebagai tindak lanjut dari inisiatif ekonomi yang dibahas antara Shinzo Abe dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. Galushka mengadakan pembicaraan dengan Hiroshige Seko, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, yang baru-baru diberi tugas tambahan untuk pengembangan hubungan ekonomi dengan Rusia.

Selama pembicaraan mereka membahas 18 proyek, beberapa di antaranya diselesaikan di EEF. Di Vladivostok, Rusia dan Jepang menandatangani 20 perjanjian bernilai sekitar \$ 1.3 miliar. Proyek-proyek itu diantaranya:

1. Infrastruktur di Timur Jauh Rusia

Proyek-proyek yang sedang dibahas dibagi menjadi lima kelompok. Kelompok pertama terdiri dari proyek-proyek yang sudah berfungsi atau sudah cukup siap. Ini termasuk inisiatif yang dipimpin oleh JGC, *Hokkaido Corporation*, dan *Iida Group Holdings*. Kelompok pertama ini juga termasuk proyek batubara, rekonstruksi Bandara Internasional Khabarovsk, serta pabrik untuk memproduksi mesin diesel Mazda di Vladivostok.

2. Investasi bersama

Para menteri juga membahas platform investasi bersama pada EEF. Perjanjian ini ditandatangani antara Bank JBIC dan Badan Timur Jauh untuk menarik investasi dan dukungan ekspor. Jepang juga mengusulkan untuk menciptakan dana bersama untuk pengembangan bio-sumber daya laut, dan dana untuk pembangunan perkotaan.

3. Farmasi

Kelompok lain dari proyek ini didedikasikan untuk industri farmasi. Di sektor ini, perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi sejumlah tantangan, termasuk

terkait dengan undang-undang Rusia. Teritorial Percepatan Pembangunan (TADS) dan Vladivostok Panduan Port memiliki aturan dan peraturan untuk investor asing. yang perusahaan Jepang dapat mengambil keuntungan dari khusus.

4. Jembatan energi

Dalam agenda proyek juga termasuk pengembangan link infrastruktur antara Rusia dan Jepang. dan khususnya proyek jembatan energi yang menghubungkan Sakhalin dengan Hokkaido. JBIC tertarik dalam proyek ini. Jepang juga diundang untuk berpartisipasi dalam pengembangan cluster kedirgantaraan dekat Vostochny Cosmodrome baru. Dalam hal ini Abe menunjuk Seko sebagai menteri untuk pengembangan hubungan ekonomi dengan Rusia. Para menteri sepakat untuk bertemu pada bulan November untuk meninjau kemajuan dalam proyek bersama (Suslina, 2016).

Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah pengumuman kunjungan Putin ke Jepang pada tanggal 15 Desember. yang telah ditunda dari tahun 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden Vladimir Putin menyambut baik usulan Jepang terkait kerjasama ekonomi antara Jepang dan Rusia untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara yang diakibatkan oleh sengketa teritorial atas Kepulauan Kuril Selatan (Wilayah Utara).

KTT Jepang – Rusia di Nagato. Jepang

Pada tanggal 15-16 Desember 2016 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Nagato. sebuah resort musim panas di Jepang. Kedua pemimpin ditetapkan untuk membahas sengketa wilayah yang telah menyebabkan dua negara bertetangga ini belum menandatangani perjanjian damai pasca-Perang Dunia II. Jepang mengatakan pulau-pulau - Etorofu. Kunashiri.

Shikotan dan kelompok pulau Habomai - adalah wilayah yang melekat dengan Jepang yang secara ilegal disita oleh Uni Soviet setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945. Namun Rusia mengatakan Uni Soviet mengambil pulau ini sah sebagai hasil dari perang dan kemudian diserahkan kepada Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet. Setelah tinggal di resort spa panas. Abe dan Putin akan melakukan perjalanan ke Tokyo hari berikutnya untuk putaran lain dari pertemuan difokuskan pada kerjasama ekonomi. mengadakan konferensi pers bersama dan menghadiri forum bisnis (Nogi, 2016).

Respon Rusia

Berdasarkan beberapa pertemuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Rusia. Rusia sangat terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Jepang untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak melalui pendekatan baru yang tidak lagi menggunakan cara berpikir tradisional untuk menyelesaikan sengketa teritorial atas Kepulauan Kuril Selatan. Rusia juga sepakat untuk bernegosiasi dari sudut pandang yang berorientasi pada masa depan. dengan mempertimbangkan tidak hanya perspektif bilateral antara Jepang dan Rusia. tetapi juga perspektif global. Pada petemuannya disela-sela KTT G20 di Saint Petersburg pada bulan September 2013 Presiden Vladimir Putin mengeluarkan kata-kata yang bernada damai. dia mengatakan bahwa tidak normal jika antara dua negara yang bertetangga tidak ada perjanjian perdamaian. Saat itu juga Putin mengatakan dia

ingin menyelesaikan pertikaian dengan cara "*hikiwake*". yaitu ungkapan dalam olahraga yudo yang berarti "seri".

Pemerintah Rusia juga mengeluarkan kebijakan bahwa Rusia akan meningkatkan investasi di wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Jepang melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk membahas sengketa wilayah dengan Rusia. Presiden Vladimir Putin juga menyambut dengan baik 8 point kerjasama ekonomi yang didalamnya termasuk peningkatan investasi Jepang di Rusia yang diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada pertemuan keduanya di Sochi, 6 Mei 2016. Sebagai bukti sambutan baik tersebut Presiden Vladimir Putin memenuhi undangan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk datang ke Jepang pada tanggal 15-16 Desember 2016. Menurut Putin, Jepang merupakan mitra penting bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan kedua negara untuk bekerja pada berbagai isu ekonomi dan politik.

Sesuai dengan teori Resolusi konflik dari *John W. Burton* bahwa resolusi konflik itu mengakhiri konflik dengan metode yang analitis dimana penyelesaiannya dengan melihat ke akar masalah yang menyebabkan adanya perilaku konflik (*problem solving*). Selain itu dalam penyelesaiannya juga berfokus kepada permasalahan yang sebenarnya dibandingkan kepada kekerasan fisik/perpecahan yang merupakan manifestasi sumber masalah dalam konflik. Oleh karena itu diplomasi yang dilakukan oleh Shinzo Abe ini dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan Rusia, tujuannya adalah yang pertama adalah untuk membangun kepercayaan antara kedua negara sehingga selanjutnya akan dapat mempermudah untuk kedua negara ini menyelesaikan sengketa teritorial yang sudah terjadi selama puluhan tahun.

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa Kepulauan Kuril Selatan antara Jepang dan Rusia. Kepulauan Kuril Selatan yang terdiri dari pulau Iturup, Kunashir, Shikotan dan Habomai. Keempat pulau jatuh ketangan Uni Soviet sebagai akibat dan kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, dan Rusia mewarisi wilayah tersebut sebagai penerus hukum dari Uni Soviet setelah pembubarannya. Tapi Jepang mengklaim bahwa Uni Soviet menduduki mereka pada akhir Perang Dunia II secara ilegal.

Jepang dan Rusia telah terlibat dalam beberapa perjanjian dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril Selatan ini. Selama lebih dari setengah abad, Jepang juga telah mencoba untuk mendapatkan kembali Kepulauan Kuril Selatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan Jepang untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril ini, baik secara militer maupun diplomatik, namun sampai saat ini permasalahan ini masih belum terselesaikan karena masing-masing pihak tetap berpegang teguh pada klaimnya masing-masing. Jepang mendasarkan klaimnya berdasarkan: (1) perjanjian Shimoda 1855; (2) Perjanjian St. Petersburg 1875; (3) Perjanjian Portsmouth 1905; (4) Deklarasi Bersama Jepang - Rusia 1956. Sedangkan Rusia mendasarkan klaimnya berdasarkan: (1) perjanjian Yalta (Februari 1945), (2) Deklarasi Potsdam (Juli 1945), dan (3) Perjanjian San Francisco (September 1951).

Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian bagaimana Diplomasi Jepang terhadap Rusia dalam penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril Selatan pada masa pemerintahan Shinzo Abe periode ke-2. Dengan metode penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif.

Maka jawabannya adalah Resolusi konflik yang paling efektif adalah dengan melakukan negosiasi yang diwujudkan dalam praktek diplomasi. Diplomasi yang dilakukan Shinzo Abe yaitu dengan mengusulkan 8 point kerjasama dengan Rusia di berbagai bidang. yang meliputi: kerjasama politik. perdagangan. investasi. budaya. kemanusiaan. infrastruktur. farmasi. serta energi. Hal tersebut dilakukan untuk memperdalam persahabatan dan kepercayaan mereka serta berupaya untuk segera menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril Selatan dan segera menandatangani perjanjian perdamaian.

Oleh karena itu resolusi konflik ini adalah alat terbaik yang dapat digunakan untuk meminimalkan dan mengurangi situasi konfliktual antara Jepang dan Rusia menjadi perdamaian dan proses pembangunan. Maka. dalam diplomasi yang dilakukan Jepang ini. Jepang berupaya agar kedua pihak yang bertikai masuk kedalam perjanjian dan kerjasama untuk memecahkan permasalahan diantara mereka dan harus menerima satu sama lainnya demi kelangsungan hubungan kedua belah pihak.

Referensi

- Akaha, Tsuneo. (1999). *A Paradigm Shift in Russo-Japanese Relations*. Seattle. Washington.
- Barston, Ronald Peter. (2014). *Modern Diplomacy*. Routledge.
- Burton, John W.. (1993). *Conflict Resolution as a Political System*. (George Mason University).
- Chai, Sun-Ki. (1997). *Entrenching the Yoshida defense doctrine: three techniques for institutionalization*. International Organization 51.03.
- Chan, John. (17 Februari 2011). *Japan and Russia in diplomatic row over disputed Kuril Islands*. wsws.org. <https://www.wsws.org/en/articles/2011/02/jpru-f17.html> diakses pada tanggal 30 September 2016
- D.V, Zolotaryova. (2013). *Dispute Between Russia And Japan Concerning Kuril Islands*. (Gumilyov Eurasian National University. Astana).
- Dawson, Chester. (8 Februari 2013). *Japan Claims Rusia Breached Its Airspace*. The Wall street Journal. <http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324590904578289590050103704> diakses pada tanggal 30 September 2016
- Drifte, Reinhard. (1990). *Japan's foreign policy*. Routledge.
- Druzhinin, Alexei. (19 Setember 2016). *Russia-Japan Bilateral Relations: Actual Peace Without Formalities*. <https://sputniknews.com/politics/201611191047613727-russia-japan-relations-peace/> diakses pada tanggal 8 Desember 2016 44
- Energy Research Institute Of The Russian Academy Of Sciences And Institute Of Energy Economics Japan. (2014). Executive summary. *A New Option For Russia's Gas Supply To Japan*. (World Petroleum Congress. Moscow). https://www.eriras.ru/files/A_New_Option_for_Russia-s_Gas_Supply_to_Japan.pdf diunduh pada tanggal 23 november 2016
- Fillippoy, Dmitry. (08 September 2016). *Shinzo Abe Going All In on Improving Japan-Russia Ties*. The Diplomat. <http://thediplomat.com/2016/09/shinzo-abe-going-all-in-on-improving-japan-russia-ties/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2016
- Gaens, Bart. (2013). *Japan's Territorial Disputes Remain Unresolved*. (The Finnish Institute of International Affairs).
- Gaiko Forum. in FBIS:DR:East Asia. 1 October 1996

- Gorenburg, Dmitry. (2012). *The Southern Kuril Islands Dispute. (PONARS Eurasia Policy: Harvard University).*
- Heidelberg Institute for International Conflict Research. (2016). *Conflict Barometer 2015.* (Heidelberg, Germany). http://rbth.com/business/2016/09/08/abes-8-point-plan-russian-minister-pays-unexpected-visit-to-tokyo_628147 diakses pada tanggal 9 Desember 2016
- http://www.pravdareport.com/world/asia/26-01-2012/120335-japan_russia_kuril_islands-0/ diakses pada tanggal 24 Oktober 2016
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Hubungan Internasional. http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_14.html diakses pada tanggal 7 Desember 2016
- Kenichi, Ito. (2005). *The Point in Dispute between Japan and Russia.* JFIR Commentary. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Budi Luhur. Email: yayahfitriyah2@gmail.com
- Masaru, Satō. (12 Mei 2016). *Signs of Progress in Sochi? Abe-Putin Summit Points to Economic Cooperation. Territorial Resolution.* <http://www.nippon.com/en/currents/d00221/> diakses pada tanggal 12 Desember 2016
- Miller, J. Berkshire. (21 November 2016). *Abe's Russian Dream.* The American Interest. <http://www.the-american-interest.com/2016/11/21/abes-russian-dream/> diakses pada tanggal 8 Desember 2016
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (5 September 2013). *Japan-Russia Summit Meeting at the G20 Saint Petersburg Summit.* http://www.mofa.go.jp/policy/economy/page18e_000026.html diakses pada tanggal 8 Desember 2016
- Ministry of Foreign Affairs Japan. Diplomatic Bluebook 2015. <http://www.mofa.go.jp/files/000106465.pdf> diunduh pada tanggal 7 Desember 2016
- Ministry of Foreign Affairs. (7 Mei 2016). *Japan-Russia Summit Meeting.* http://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page4e_000427.html diakses pada tanggal 13 Desember 2016
- Ministry of Foreign Affairs. Diplomatik Bluebook Japan 2016
- Nogi, Kazuhiro. (15 Desember 2016). *Abe. Putin meet at hot spring resort. territorial row in focus.* <http://mainichi.jp/english/articles/20161215/p2g/00m/0dm/006000c> diakses pada tanggal 15 Desember 2016
- RIA-Novosti Daily Review. 29 October 1997.
- Russian Far East Economy: Growing Expectation for Japanese Investment.* Tokyo
- Russia-US Energy information Administration (EIA). (2016). *Country Analysis Brief: Russia.* <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> diakses pada tanggal 23 November 2016
- Sankar, Sneha. (1 April 2016). *Japan's Shinzo Abe Calls For Summit With Russia's Vladimir Putin Over 'Northern Territories' Dispute.* <http://www.ibtimes.com/japans-shinzo-abe-calls-summit-russias-vladimir-putin-over-northern-territories-2247350> diakses pada tanggal 13 Desember 2016
- Sukovitsyn, Victor. (26 Januari 2012). What makes Japan cling to Russia's Kuril Islands?.
- Suslina, Natalia. (08 September 2016). *Abe's 8-point plan: Russian minister pays unexpected visit to Tokyo.* Rbth Representative In Tokyo.
- Talukdar, Indrani. (2014). *A 'Reset' in Russia and Japan Relationship?.* Indian Council of World Affairs. New delhi.

The Government of Japan. *Prime Minister Abe and Prsident Putin*.
http://www.japan.go.jp/tomodachi/2016/japan_and_russia_edition_2016/moments_of_prime_minister_abe.html diakses pada tanggal 5 Desember 2016